

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pemerintah Desa

2.1.1 Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas (Suharimin, 2018 dalam (Sihombing, 2022)).

Selanjutnya menurut Soekanto, 2017 dalam (Sihombing, 2022) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila hak dan kewajiban telah dilakukan sesuai kedudukan. Kemudian menurut Narwoko dan Suryanto (2019) mengatakan bahwa peran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dan proses sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.

Selain itu, menurut Nugroho & Lestari (2023), peran pemerintah desa di era otonomi saat ini bukan hanya sebatas penyelenggara administrasi, melainkan juga aktor pembangunan sosial yang harus adaptif dengan perubahan masyarakat. Pemerintah desa dituntut mampu menggerakkan partisipasi warga melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif.

Kemudian Hidayat & Sari (2022) juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam menjaga nilai-nilai lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai penjaga budaya dan nilai sosial di tingkat lokal.

Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas peranannya dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat berbeda-beda, seseorang dengan lainnya, baik dalam arti kebutuhannya, bagi kategori umum, maupun dalam niatnya yang kesemuanya tercermin dalam kepribadian masing-masing. Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya. Karena demikian eratnya kaitan antara persepsi seseorang dengan kepribadian dan perilakunya, maka mutlak perlu bagi pimpinan organisasi untuk memahami dan mendalami persepsi bawahannya, baik yang menyangkut peranan bawahan tersebut dalam usaha pencapaian tujuan organisasi maupun mengenai berlangsungnya seluruh proses administrasi dan manajemen dalam organisasi yang bersangkutan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka akan dijalankan peranan.

Menurut Soekanto, 2017 dalam (Sihombing, 2022) peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam suatu masyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan suatu peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang segala sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau lembaga.

3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat. Perihal fasilitas-fasilitas dalam berperan, lembaga lembaga kemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat yang yang banyak menyediakan peluangpeluang untuk pelaksanaan peranan.

Menurut Znaniecki, 2018 dalam (Soekanto 2020) setiap peranan memiliki tujuan untuk memiliki hubungan antara individu dengan orang-orang sekitarnya yang memiliki hubungan dengan peranannya tersebut, dan terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki status dan kedudukan tertentu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Peran merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang terorganisasi didalam suatu organisasi yang juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan peranan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa adalah tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa.

2.1.2 Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah institusi yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Fungsi utama pemerintah mencakup pembuatan kebijakan, penegakan hukum, penyediaan layanan publik, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Siregar dan Lubis, (2020) pemerintah berperan sebagai pengendali dan pengatur dalam masyarakat, memastikan bahwa setiap individu

dan kelompok dapat berinteraksi secara harmonis sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menjaga keseimbangan sosial.

Lebih lanjut, Putri, (2021) menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya negara untuk kepentingan publik. Ini mencakup pengelolaan ekonomi, sumber daya alam, dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks desentralisasi, menurut Rahman dan Wijaya, (2022) mengamati bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya beroperasi pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat lokal untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat relevan dan efektif dalam konteks spesifik.

Secara keseluruhan, pemerintah berfungsi sebagai pilar utama dalam struktur sosial dan politik suatu negara, dengan peran yang kompleks dan multidimensional. Melalui berbagai fungsi dan tanggung jawabnya, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara dihormati dan dilindungi.

2.1.3 Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, desa didefinisikan sebagai berikut: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Desa tidak hanya dilihat dari lokasi geografisnya, tapi juga dari karakteristik sosial-ekonomi warganya. Interaksi antarpenduduk yang erat serta ketergantungan pada pertanian merupakan ciri khas utama. Desa juga berinteraksi dengan kota atau daerah lain, artinya desa tidak sepenuhnya terisolasi. Menurut Rifhi Siddiq, (2024) desa adalah kawasan dengan kepadatan penduduk yang rendah, masyarakatnya memiliki interaksi sosial yang cenderung homogen (seragam), mata pencaharian utamanya berada di sektor pertanian, dan memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan wilayah lain di sekitarnya.

Sedangkan menurut Gatot Harmanto & Rudi Hartono, (2020) Desa adalah tempat tinggal dengan jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa. Definisi ini kuantitatif, menyoroti jumlah populasi sebagai ukuran sebuah wilayah dikategorikan desa. Meskipun agak sederhana, pendekatan ini dapat digunakan dalam konteks statistik atau perencanaan wilayah.

2.1.4 Peran Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat paling bawah. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara, pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah pusat maupun daerah. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintah desa semakin diperkuat baik dalam hal kewenangan, pengelolaan anggaran, maupun pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal.

Di era otonomi desa saat ini, pemerintah desa tidak hanya berperan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan semata, tetapi juga menjadi aktor utama dalam pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, serta perencanaan pembangunan yang partisipatif. Pemerintah desa dituntut

untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam melayani masyarakat serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peran ini menjadi sangat vital karena desa merupakan basis utama kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan peran yang strategis tersebut, maka keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada bagaimana pemerintah desa mampu menjalankan fungsinya secara maksimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran, fungsi, serta tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa. Menurut Samaun, (2022) pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pembangunan desa sebagai inovator, motivator, dan fasilitator. Sebagai inovator, pemerintah desa harus mampu menciptakan ide-ide pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Sebagai motivator, mereka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Sedangkan sebagai fasilitator, pemerintah desa berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran program-program desa.

Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan Administrasi. Menurut Riendy dkk, (2022) menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Pelayanan ini meliputi pengelolaan dokumen administrasi kependudukan seperti e-KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Pemerintah desa yang responsif dan profesional dalam memberikan layanan akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Dalam kajian Nurmitasari, (2024) strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mencakup transparansi informasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah desa perlu membuka akses informasi secara luas agar masyarakat dapat memahami manfaat program desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan

dan evaluasi kegiatan desa juga sangat penting agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan di wilayahnya.

2.1.5 Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki tugas pokok yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara umum, tugas pokok pemerintah desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah uraian lebih lanjut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa, termasuk menetapkan peraturan desa, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta mengelola aset desa. Kepala desa bersama perangkatnya harus mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Pelaksanaan Pembangunan. Pembangunan desa mencakup pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan desa, saluran irigasi, air bersih, dan fasilitas pendidikan. Pemerintah desa juga bertugas mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa dan menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan (RPJMDes dan RKPDes).
3. Pembinaan Kemasyarakatan. Pemerintah desa memiliki peran membina kehidupan sosial masyarakat desa, seperti menjaga kerukunan, memberdayakan lembaga kemasyarakatan, serta melestarikan budaya lokal. Ini juga mencakup peran dalam mengelola ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat. Tugas lain yang tak kalah penting adalah mendorong kemandirian masyarakat desa melalui program pelatihan, penguatan ekonomi lokal, dan pengembangan potensi desa seperti Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah desa harus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Lestari & Wahyudi, (2022) dalam jurnal JISIP, keterlibatan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat harus dilandasi prinsip partisipatif agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Sementara Kurniasih, (2023) menyatakan dalam jurnal JPPM bahwa efektivitas tugas pokok pemerintah desa juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem pengawasan yang baik.

2.1.6 Indikator Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Keberadaan dan efektivitas pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang dapat menggambarkan kondisi, struktur, dan pelaksanaan fungsi pemerintahan desa secara komprehensif.

Indikator pemerintah desa disusun untuk mengidentifikasi sejauh mana pemerintah desa telah memenuhi aspek legalitas, struktur organisasi, pelaksanaan fungsi pemerintahan, hingga hubungan kelembagaan dengan masyarakat. Indikator-indikator ini menjadi dasar dalam menilai peran pemerintah desa sebagai pelaksana utama pembangunan di tingkat lokal sekaligus sebagai garda terdepan pelayanan publik di pedesaan.

Menurut Nugroho & Lestari, (2023) bahwa terdapat beberapa indikator pemerintah desa diantaranya sebagai berikut:

- 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Keberadaan dan kelengkapan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2. Legalitas Pemerintah Desa**

Adanya Peraturan Desa (Perdes), Surat Keputusan Kepala Desa, dan dokumen hukum lainnya yang sah.

3. Ketersediaan Dokumen Administratif Desa

Adanya dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), RKPDes, dan APBDes.

4. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Desa

Pemerintah desa menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan secara formal.

2. Hubungan Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa Lainnya

Adanya koordinasi antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan desa.

3. Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa

Tingkat pendidikan, pelatihan, dan kompetensi aparatur desa.

4. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

Ketersediaan kantor desa, fasilitas kerja, dan infrastruktur pendukung lainnya.

5. Tingkat Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintahan

Kesesuaian tata kelola pemerintahan desa dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.

2.2 Budaya Gotong Royong

2.2.1 Pengertian Budaya

Budaya merupakan konsep kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan lain yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa budaya tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga nilai dan norma yang membentuk perilaku serta identitas suatu kelompok sosial. Dalam konteks Indonesia, pemahaman budaya menjadi krusial mengingat keragaman tradisi dan nilai yang ada di berbagai daerah.

Menurut Hamid et al., (2023) melalui pendekatan *Systemic Literature Review* menyoroti bahwa Indonesia memiliki beragam makna budaya dengan sejarah tradisi yang bervariasi di setiap daerah. Studi ini menegaskan pentingnya memahami dan melestarikan kekayaan budaya tersebut sebagai bagian dari identitas nasional.

Sedangkan Ammar, (2023) menekankan bahwa pluralisme budaya dalam masyarakat kontemporer memerlukan pendekatan interdisipliner untuk memahami kompleksitas identitas individu dan dinamika sosial yang terjadi. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa budaya merupakan elemen dinamis yang terus berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk teknologi dan interaksi antarbudaya.

Kemudian menurut Eliyani, (2023) mengeksplorasi bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi nilai-nilai budaya dan pola perilaku dalam masyarakat kontemporer. Hasil studi ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki dampak signifikan terhadap transformasi budaya, baik dalam memperkuat maupun menggeser nilai-nilai tradisional.

Selain itu, menurut Pebriani et al., (2023) membahas identitas budaya dalam konteks perubahan sosial, menyoroti bagaimana perubahan struktural dalam masyarakat dapat mempengaruhi persepsi dan ekspresi identitas budaya. Kedua studi ini menegaskan bahwa budaya tidak statis, melainkan terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial.

Dalam konteks kepemimpinan pendidikan global, menurut Afrianto et al., (2023) menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai budaya dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap keragaman. Pendekatan ini menekankan bahwa pemahaman budaya yang mendalam berperan penting dalam mengelola keberagaman dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terbaru ini menegaskan bahwa budaya adalah elemen fundamental yang membentuk identitas individu dan kolektif, serta memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan, dan teknologi.

Menurut Pamungkas et al., (2022), gotong royong berfungsi memperkuat modal sosial yang sangat penting bagi pembangunan desa. Namun, di era globalisasi, praktik gotong royong semakin tergerus oleh individualisme. Sementara itu, Marhayati, (2021) menemukan bahwa generasi muda cenderung lebih memilih aktivitas berbasis teknologi dibanding terlibat langsung dalam kegiatan sosial desa.

Kondisi ini menandakan bahwa budaya gotong royong perlu direvitalisasi melalui pendekatan edukasi, digitalisasi partisipasi, dan penguatan peran pemerintah desa.

Dari berbagai pendapat di atas budaya dapat disimpulkan sebagai sistem nilai, norma, kepercayaan, serta pola perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Budaya tidak hanya mencerminkan identitas suatu kelompok masyarakat, tetapi juga menjadi landasan dalam membentuk interaksi sosial, pola pikir, dan tindakan kolektif dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, budaya adalah entitas yang dinamis dan multidimensional, yang memainkan peran penting dalam menciptakan kohesi sosial, membentuk identitas kolektif, serta menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada keberagaman masyarakat.

2.2.2 Pengertian Gotong Royong

Gotong royong merupakan konsep budaya Indonesia yang mencerminkan kerja sama dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa, di mana "gotong" berarti "mengangkat" dan "royong" berarti "bersama-sama," sehingga secara harfiah berarti mengangkat sesuatu secara bersama-sama. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi dan saling membantu antaranggota komunitas untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengharapkan imbalan materi

Menurut Marhayati, (2021) gotong royong adalah bentuk solidaritas sosial yang terbentuk melalui bantuan timbal balik antarindividu dalam masyarakat, yang didasari oleh nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan.

Nilai-nilai ini telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan sosial di Indonesia, mencerminkan identitas nasional yang kuat. Namun, dalam era globalisasi, praktik gotong royong menghadapi tantangan signifikan akibat perubahan sosial dan budaya yang cepat.

Sedangkan menurut Arief dan Yuwanto, (2023) meninjau gotong royong dari perspektif teori nilai dasar manusia (*Basic Human Values Theory*) dan menemukan bahwa budaya ini mengandung nilai-nilai universal seperti keamanan, tradisi, dan stimulasi. Penelitian mereka menegaskan bahwa gotong royong tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga penting dalam membangun harmoni dan kesejahteraan sosial di masyarakat modern.

Selain itu, menurut Pamungkas et al., (2022) menyoroti bahwa gotong royong berperan penting dalam memperkuat partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka mengamati bahwa praktik gotong royong mendorong keterlibatan aktif individu dalam kegiatan sosial, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan memperkuat nilai-nilai demokratis dalam komunitas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gotong royong adalah nilai budaya khas Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas sosial, dan saling membantu antaranggota masyarakat tanpa pamrih. Konsep ini tidak hanya menjadi warisan budaya leluhur, tetapi juga merupakan identitas nasional yang membentuk karakter sosial bangsa Indonesia. Dengan demikian, gotong royong bukan hanya sekadar aktivitas sosial, tetapi juga sistem nilai yang harus terus dilestarikan dan dikembangkan dalam menghadapi perubahan zaman. Nilai ini tetap relevan dan dapat menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan harmonis.

2.2.3 Nilai – Nilai Gotong Royong

Gotong royong merupakan nilai budaya fundamental dalam masyarakat Indonesia yang menekankan kerja sama, solidaritas, dan kebersamaan dalam

mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong meliputi:

1. **Kebersamaan dan Kekeluargaan:** Gotong royong memperkuat rasa kebersamaan dan kekeluargaan antaranggota masyarakat, menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung.
2. **Tanggung Jawab Sosial:** Melalui gotong royong, individu diajarkan untuk memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan komunitas, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial demi kepentingan bersama.
3. **Sukarela dan Tolong-Menolong:** Praktik gotong royong didasari oleh kesediaan sukarela untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan, menumbuhkan semangat tolong-menolong dan empati dalam masyarakat.
4. **Persatuan dan Kesatuan:** Gotong royong berperan dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, mengatasi perbedaan dengan bekerja bersama demi tujuan yang sama.
5. **Kebermanfaatan Bersama:** Kegiatan gotong royong bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh anggota komunitas, memastikan bahwa hasil usaha bersama dapat dinikmati secara kolektif.
6. **Keadilan Sosial:** Dengan bekerja bersama, gotong royong mendorong distribusi sumber daya dan beban kerja yang adil di antara anggota masyarakat, mencerminkan prinsip keadilan sosial.

Nilai-nilai tersebut menjadikan gotong royong sebagai elemen penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, solid, dan berkeadilan. Namun, di era globalisasi, nilai-nilai ini menghadapi tantangan dari individualisme dan perubahan sosial, sehingga diperlukan upaya untuk mempertahankan dan menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.4 Fungsi Sosial Gotong Royong

Gotong royong merupakan salah satu pilar utama dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, mencerminkan semangat kerja sama dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi sosial gotong royong meliputi beberapa aspek penting:

1. **Memperkuat Solidaritas Sosial:** Gotong royong mempererat hubungan antarindividu dalam komunitas, menciptakan rasa kebersamaan dan saling memiliki. Praktik ini membantu membangun jaringan sosial yang kuat, memungkinkan anggota masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.
2. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:** Melalui gotong royong, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan. Partisipasi ini mencerminkan komitmen kolektif dalam memajukan kesejahteraan bersama dan memperkuat keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.
3. **Membangun Modal Sosial:** Gotong royong berfungsi sebagai modal sosial yang berharga, di mana nilai-nilai seperti kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dikembangkan. Modal sosial ini menjadi dasar bagi kerja sama yang efektif dan harmonis dalam komunitas.
4. **Mengatasi Masalah Sosial Secara Kolektif:** Melalui gotong royong, masyarakat dapat secara bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, bencana alam, atau pembangunan infrastruktur. Pendekatan kolektif ini memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih efisien dan efektif.
5. **Menjaga dan Melestarikan Budaya Lokal:** Gotong royong juga berperan dalam mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai budaya lokal kepada generasi berikutnya, memastikan bahwa tradisi dan kearifan lokal tetap hidup dan relevan dalam kehidupan modern.

Dengan demikian, gotong royong tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam membangun dan memelihara kohesi sosial, partisipasi aktif, serta pelestarian budaya dalam masyarakat.

2.2.5 Tantangan Dalam Pelestarian Gotong Royong

Nilai gotong royong, sebagai salah satu pilar budaya Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam pelestariannya di era modern. Salah satu

tantangan utama adalah pengaruh globalisasi yang mendorong individualisme dan materialisme, sehingga menggeser nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas yang menjadi inti dari gotong royong.

Urbanisasi dan modernisasi juga berkontribusi pada pergeseran nilai ini. Perpindahan penduduk dari desa ke kota sering kali menyebabkan melemahnya ikatan sosial dan menurunnya partisipasi dalam kegiatan komunitas. Gaya hidup perkotaan yang sibuk dan kurangnya interaksi antarwarga memperburuk situasi ini Pahria dkk, (2023).

Perkembangan teknologi digital dan media sosial turut mempengaruhi pola interaksi sosial masyarakat. Meskipun teknologi dapat memfasilitasi komunikasi, namun juga dapat mengurangi interaksi tatap muka yang esensial dalam praktik gotong royong tradisional.

Selain itu, kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya gotong royong di kalangan generasi muda menyebabkan nilai ini semakin terpinggirkan. Tanpa pemahaman dan apresiasi yang memadai, generasi penerus mungkin tidak melihat relevansi gotong royong dalam kehidupan mereka.

2.2.6 Upaya Pelestarian dan Penguatan Nilai Gotong Royong

Nilai gotong royong, sebagai salah satu pilar budaya Indonesia, menghadapi tantangan di era modern yang ditandai dengan meningkatnya individualisme dan pengaruh globalisasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk melestarikan dan memperkuat nilai ini, seperti yang diungkapkan dalam beberapa penelitian berikut:

1. Integrasi dalam Pendidikan Formal: Muhammad Naufal Rifaldi dkk, (2023) dalam penelitian mereka menyoroti pentingnya peran pendidikan dalam menanamkan kembali nilai gotong royong yang mulai memudar akibat pengaruh individualisme dan modernisasi. Mereka menekankan bahwa melalui pendidikan, nilai-nilai kebersamaan dapat diperkuat kembali di tengah arus globalisasi.

2. Pelestarian Tradisi Lokal: Menurut Fusnika dkk, (2022) meneliti implementasi nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka menemukan bahwa meskipun nilai gotong royong mengalami pergeseran akibat modernisasi, upaya pelestarian dilakukan melalui kegiatan rutin seperti kerja bakti dan jadwal rutin dalam mengurus kepentingan bersama.
3. Penerapan dalam Organisasi Kemahasiswaan: Penelitian yang dilakukan oleh HIMA PKN FIS UNNES menunjukkan bahwa penerapan nilai gotong royong dalam penguatan solidaritas sosial terlihat dari pelaksanaan program kerja serta hubungan antar pengurus yang didasari oleh rasa kekeluargaan dan tenggang rasa.
4. Penguatan Melalui Tradisi Adat: Menurut Armadella, (2022) menyoroti tradisi Begawi Adat Cakak Pepadun di Kampung Negeri Sakti sebagai sarana pelestarian nilai gotong royong. Tradisi ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan adat yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan.

Upaya pelestarian dan penguatan nilai gotong royong di Indonesia dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk integrasi dalam pendidikan formal, pelestarian tradisi lokal, penerapan dalam organisasi kemahasiswaan, dan penguatan melalui tradisi adat. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa nilai gotong royong tetap menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

2.2.7 Indikator Gotong Royong

Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur yang menjadi ciri khas kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Nilai ini mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian antarwarga dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan secara kolektif. Meskipun perkembangan zaman dan modernisasi membawa banyak perubahan dalam pola hidup masyarakat, semangat gotong royong tetap menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berdaya.

Untuk mengukur keberlangsungan dan peran gotong royong dalam kehidupan masyarakat desa, diperlukan indikator yang mampu menggambarkan bentuk, intensitas, serta kualitas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bersama. Indikator gotong royong ini mencakup aspek partisipasi warga, kepedulian lingkungan, sikap saling membantu, nilai kebersamaan, serta dukungan dari tokoh masyarakat dalam membangun solidaritas sosial.

Menurut Sari, N. P., & Hidayat, T., (2023) terdapat beberapa indikator terkait budaya gotong royong berikut uraiannya:

1. Partisipasi Warga dalam Kegiatan Sosial

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seperti kerja bakti, pembangunan fasilitas umum, dan acara desa.

2. Kepedulian terhadap Lingkungan Sekitar

Kesediaan warga membantu membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, dan menjaga kebersihan bersama.

3. Sikap Saling Membantu antar Warga

Kehadiran nilai saling membantu tanpa pamrih, seperti membantu tetangga saat ada hajatan, musibah, atau panen.

4. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong

Frekuensi dan kesinambungan kegiatan gotong royong di masyarakat.

5. Koordinasi antara Warga dan Pemerintah Desa

Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan kegiatan gotong royong.

6. Nilai Kebersamaan dan Solidaritas Sosial

Tingkat rasa memiliki dan solidaritas antarwarga dalam menyelesaikan masalah bersama.

7. Peran Tokoh Masyarakat dalam Mendorong Gotong Royong

Keterlibatan tokoh adat, agama, dan pemuda dalam menggerakkan semangat gotong royong.

Melalui indikator-indikator ini, peneliti maupun pemangku kebijakan dapat menilai sejauh mana nilai gotong royong masih tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan sosial yang mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu juga dikenal sebagai tinjauan pustaka, atau upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu membantu penelitian untuk memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Para ahli menjelaskan bahwa penelitian terdahulu memiliki manfaat yang signifikan dalam penelitian, seperti memperluas dan memperdalam teori yang kan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan.

Tabel dibawah ini berisi terkait rangkuman dari hasil penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas yang digunakan peneliti sebagai bahan referensi dalam melakukan dan mengembangkan pemahaman tentang hasil penelitian. Berikut rangkumannya:

Tabel 2.1

Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Intan Prastika (2023)	Peranan Pemerintah Dalam Program Gotong Royong Di Kelurahan Sei Kera Hilir Ii Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan	Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ialah lurah, sekertaris lurah, kasi pemerintahan, kasi

			pembangunan dan masyarakat. Peran pemerintah lurah terhadap pelaksanaan kegiatan gotong royong sudah berjalan dengan baik dalam memberikan arahan serta motivasi untuk melaksanakan kegiatan gotong royong. Adapun faktor penghambat ialah tidak peduli karena sudah ada yang mewakilkan untuk bergotong royong.
2	David Pracipto (2023)	Budaya Gotong Royong Di Desa Sidobinangun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Gotong Royong di Desa Sido Binangun benar telah mengalami dampak terhadap adanya pandemi Covid-19 hal ini dapat dilihat adanya bahwa perubahan pada nilai dan tata pelaksanaan di masyarakat. Pergeseran nilai gotong royong yang di sebabkan oleh (1) faktor kesibukan yaitu adanya masa pandemi yang membuat menurunkan minat

			bergotong royong sistem upah atau gaji, dan adanya rasa berat memanggil atau mengumpulkan warga untuk bergotong royong dan adanya turunya semangat bergotong royong pada masyarakat (2) Adanya pengaruh setelah pandemi terhadap budaya Gotong Royong di Desa Sido Binangun baik dalam segi pelaksanaannya, tata cara maupun pelaksanaan
3	Kabul Suryoadi et al. (2022)	Peran Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Nilai Karakter Gotong Royong Pada Pemuda Karang Taruna Guna Darma Di Desa Gempoldenok Kabupaten Demak	Penelitian ini di latar belakang dari Nilai karakter gotong royong para pemuda karang taruna mulai ditinggalkan dan jarang diterapkan padahal sebetulnya partisipasi pemuda dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintah desa sangat diperlukan. Karena karang taruna yang didominasi oleh sosok pemuda dan juga bagian dari masyarakat seharusnya mampu menjadi

			contoh bagi masyarakat serta menjadi tombak utama dalam mencapai tujuan kemajuan desa. Adanya kerjasama yang terjalin dalam hidup bermasyarakat merupakan suatu bukti keselarasan hidup antar sesama dalam suatu komunitas, terutama komunitas yang masih menghormati dan menjalankan nilai-nilai kehidupan dan kearifan lokal, yang biasanya dilakukan oleh komunitas pedesaan atau komunitas tradisional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan Tlogosari Kota Semarang
4	Rabania (2021)	Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial Masyarakat Di Desa	penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif deskriptif sebagaimana peneliti ini merupakan cara untuk mengumpulkan data

		Kramat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu	dan memaparkan hasil temuan yang didapatkan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi, kemudian disusun dengan bentuk tulisan dan analisis. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan solidaritas sosial masyarakat di Desa Kramat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, bentuk solidaritas sosial masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam meningkatkan solidaritas sosial masyarakat. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa peran kepala desa merupakan seorang pemimpin yang sangat berperan penting dalam mewujudkan solidaritas sosial masyarakat.
--	--	--	--

Sumber : Olahan Peneliti, (2025)

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam gotong royong telah diteliti dari berbagai sudut pandang, seperti kepemimpinan Rabania, (2021), partisipasi pemuda Kabul Suryoadi et al., (2022), dan dampak pandemi David Pracipto, (2023). Namun, penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada perubahan nilai gotong royong secara umum atau pada kelompok tertentu (misalnya pemuda).

Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis peran pemerintah desa dalam merespons perubahan budaya gotong royong akibat faktor sosial, ekonomi, dan teknologi di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena menyoroti strategi pemerintah desa dalam menghadapi perubahan budaya gotong royong di Desa Hiligara.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir untuk memberikan penjelasan singkat tentang gejala yang menjadi masalah penelitian. Kerangka berpikir dalam metodologi penelitian kualitatif adalah panduan konseptual yang digunakan oleh peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Ini mencakup konsep, teori dan asumsi yang relevan dengan topik penelitian, serta hubungan antara berbagai konsep tersebut.

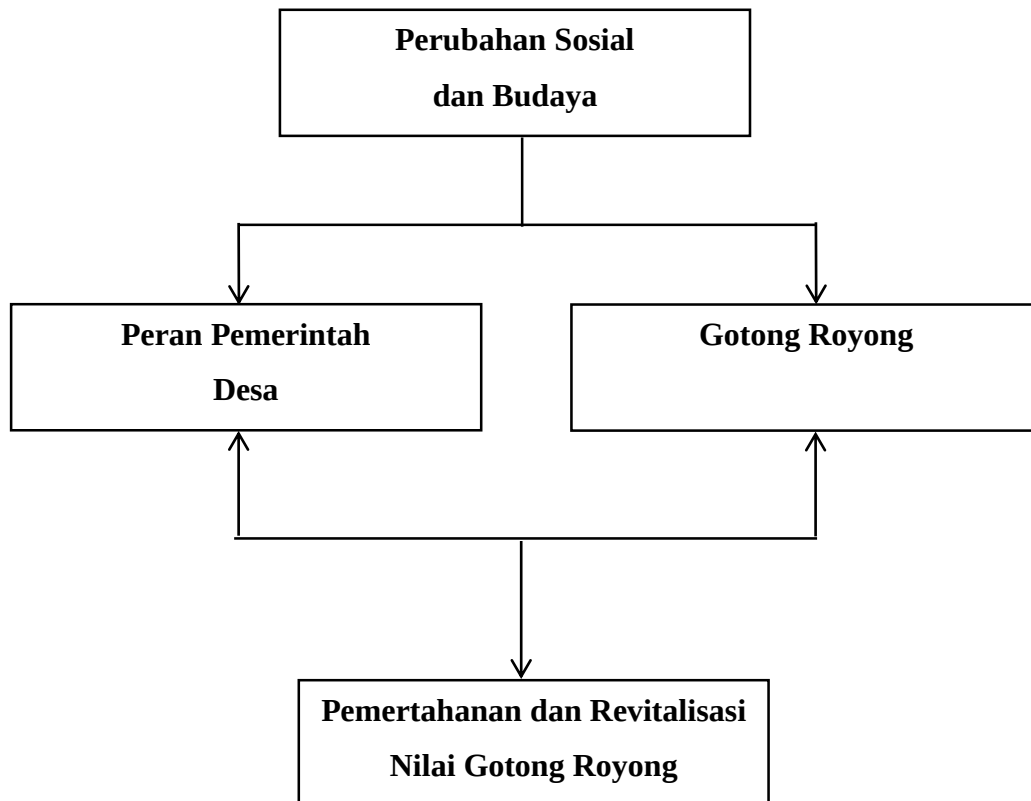
Kerangka berpikir membantu peneliti untuk mengarahkan fokus penelitian, menentukan pertanyaan penelitian, dan memilih metode pengumpulan serta analisis data yang tepat. Tujuan dari kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif adalah untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian. Ini membantu peneliti dalam mengorganisasikan dan menafsirkan data secara sistematis, memastikan bahwa penelitian dilakukan secara konsisten dan dapat diandalkan.

Alur penelitian ini menjelaskan tentang konsep peran pemerintah desa dalam menghadapi perubahan budaya gotong royong. Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, dapat dirumuskan kerangka berpikir bahwa perubahan sosial, tekanan ekonomi, dan perkembangan teknologi berkontribusi

pada pudarnya budaya gotong royong. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, motivator, dan inovator untuk mempertahankan nilai gotong royong. Jika peran ini dijalankan secara optimal, maka akan mendukung revitalisasi budaya gotong royong di Desa Hiligara.

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Sumber : Olahan Peneliti, (2025)

Budaya gotong royong merupakan warisan nilai sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat desa. Gotong royong mencerminkan semangat kebersamaan, tolong-menolong, dan partisipasi aktif dalam membangun lingkungan sekitar tanpa mengharapkan imbalan. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh globalisasi, modernisasi, dan pergeseran pola hidup masyarakat, nilai-nilai gotong royong di banyak desa mulai mengalami perubahan. Masyarakat cenderung menjadi lebih individualistis,

sibuk dengan pekerjaan pribadi, dan kurang memiliki waktu untuk kegiatan kolektif.

Fenomena ini juga mulai dirasakan di Desa Hiligara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, di mana semangat gotong royong mulai berkurang, terutama di kalangan generasi muda. Banyak kegiatan sosial seperti kerja bakti, pembangunan fasilitas umum, atau kegiatan adat yang dulunya dikerjakan secara bersama-sama kini menghadapi tantangan dalam hal partisipasi warga.

Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran strategis untuk menjaga keberlangsungan budaya gotong royong. Pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pengelola administrasi, tetapi juga sebagai aktor utama yang mendorong partisipasi sosial dan menjaga nilai-nilai lokal. Peran pemerintah desa dapat dikategorikan menjadi tiga:

1. Sebagai fasilitator, pemerintah desa harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan gotong royong, seperti pengadaan alat kerja bakti, tempat musyawarah, atau media informasi kegiatan sosial.
2. Sebagai motivator, pemerintah desa berperan memberi dorongan moral kepada masyarakat untuk tetap terlibat dalam kegiatan sosial, seperti memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif atau menjadi teladan dalam pelaksanaan gotong royong.
3. Sebagai inisiator/inovator, pemerintah desa dituntut untuk menciptakan program-program baru yang mampu merevitalisasi semangat gotong royong, misalnya dengan menggabungkan tradisi gotong royong dengan program pembangunan desa berbasis partisipasi.

Melalui peran-peran tersebut, diharapkan pemerintah desa mampu mengurangi dampak negatif dari perubahan budaya, dan bahkan mengembangkan model gotong royong yang lebih kontekstual dengan zaman, namun tetap menjaga esensi nilai kebersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana peran pemerintah desa dalam merespon tantangan perubahan budaya tersebut di Desa Hiligara, serta strategi

apa yang dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai gotong royong di tengah perubahan sosial.